



EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI TINGKAT SEKOLAH DASAR

Eddy Junaedi

Universitas Singa Perbangsa Karawang, Jawa Barat, Indonesia

Correspondence: E-mail: eddyjunaedi59@gmail.com

ABSTRACTS

An effective inclusive education policy has the ability for good school management skills. During this time the inclusive education process has not been able to realize the vision, mission, goals and objectives in schools. These problems will cause school principals, educators, and administrative staff as operators not yet to consider providing excellent services to inclusive learners, looking for solutions that require and meet the needs of stakeholders. The focus of consideration is the effectiveness of inclusive education policies at the elementary school level, namely: 1) what is the process of establishing inclusive education policies; 2) What is the socialization of inclusive education policy; 3) What is an inclusive education program; 4) how to implement inclusive education; 5) carrying out monitoring efforts and evaluating the implementation of inclusive education; 6) how important is the application of inclusive education. The aim is to describe the effectiveness of inclusive education policy and develop a model of the effectiveness of inclusive education policy in primary schools. This descriptive study was conducted with case studies in three schools, namely SDN 2 Cibabat Mandiri, SDN 5 Leuwi Gajah and SDN Cigugur Tengah in Cimahi City. The technique of extracting data is done by observing, interviewing and studying the school documentation. Data processing is done through the process of data analysis, display, and data verification.. Researchers discuss several things, namely: first, the city government needs it specifically for inclusive education, which requires the problem of teachers, sapras, funding and involvement of related agencies; secondly, the school principal supports him proactively cooperating with the closest primary school for exceptional childrens to support the implementation of inclusive education; third, to improve the effectiveness of supervision and guidance of the barriers carried out by primary school for exceptional children supervisors.

Keyword: *Effectiveness of Inclusive Education, Policy Implementation*

© 2019 Tim Pengembang Jurnal UPI

ARTICLE INFO

Article History:

Received 7 July 2019

Revised 20 August 2019

Accepted 21 September 2019

Available online 30 October 2019

1. PENDAHULUAN

Pendidikan inklusif mempunyai arti bahwa sekolah harus mengakomodasi semua anak tanpa mempedulikan keadaan fisik, intelektual, sosial, emosi, bahasa, atau kondisi-kondisi lain, termasuk anak-anak penyandang cacat, anak-anak berbakat (*gifted children*), pekerja anak dan anak jalanan, anak daerah terpencil, anak-anak dari kelompok etnik dan bahasa minoritas dan anak-anak yang tidak beruntung dan terpinggirkan dari kelompok masyarakat (*Salaman Statement*, 1994).

Sebagaimana tertuang dalam peraturan menteri pendidikan nasional nomor 70 tahun 2009 pasal 2 tentang pendidikan inklusif bertujuan untuk:

- (a) “memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecardasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan bakat dan kemampuannya.”
- (b) “mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik sebagaimana yang dimaksud pada huruf a”.

Pendidikan inklusif bersifat terbuka terhadap perbedaan karakter peserta didik dan berupaya mengakomodasi setiap perbedaan tersebut dengan cara-cara yang tidak merugikan peserta didik lain. Bahkan, dalam pendidikan inklusi diharapkan perbedaan karakteristik siswa menjadi pembelajaran tersendiri dan bernilai manfaat bagi setiap peserta didik. Usaha saling memahami perbedaan antar peserta didik dan upaya untuk memperlakukan perbedaan antar peserta didik secara semestinya memberi nilai *plus* bagi pendidikan inklusif.

Sekalipun perkembangan pendidikan inklusi di negara kita cukup menggembirakan dan mendapat apresiasi dan antusiasme dari berbagai kalangan, terutama para praktisi pendidikan, namun sejauh ini dalam tataran implementasinya di lapangan masih dihadapkan kepada berbagai isu dan permasalahan. Salah satu bagian penting dari *suppor system* adalah tentang penyiapan anak.

Banyak harapan dari implementasi pendidikan inklusif, namun fakta menunjukkan masih terdapat banyak permasalahan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif (*Hasil diskusi dengan guru dan kepala sekolah penyelenggara inklusif peserta pelatihan di Yogyakarta*, 2009). Beberapa permasalahan tersebut dapat diidentifikasi antara lain: (1) masih ada kesulitan menyelaraskan antara standar layanan persekolahan reguler yang selama ini berjalan dan variasi kebutuhan belajar ABK; (2) sekolah inklusif belum menerima siswa ABK; (3) sekolah belum mampu menyediakan program yang tepat, bagi ABK dengan kondisi kecerdasan di bawah rata-rata (*tunagrahita*); (4) belum ada sistem evaluasi hasil belajar (baik formatif dan sumatif) yang tepat sesuai kebutuhan ABK; (5) kurangnya sarana dan sumber belajar asesabilitas untuk mengakomodasi kebutuhan mobilitas dan belajar ABK; (6) belum semua guru reguler memiliki kompetensi memberikan layanan ABK dan masih minimnya guru khusus di sekolah inklusif, meskipun bukan suatu keharusan (*indentik*) antara guru khusus dan sekolah inklusif; (7) belum seluruh warga sekolah memiliki kesepahaman tentang pendidikan inklusif dan layanan ABK; (8) masih adanya anggapan keberadaan ABK akan mempengaruhi ketuntasan hasil belajar akhir tahun, akibatnya ABK dipindahkan di SLB menjelang ujian; (9) layanan inklusif masih belum menyatu dalam sistem dan iklim sekolah, sehingga ada dua label siswa ABK dan reguler; (10) belum semua pengambil kebijakan termasuk bidang

pendidikan memahami tentang sistem inklusif; (11) secara pengelolaan pelaksanaan pendidikan inklusif kurang dipersiapkan dengan komprehensif; dan (12) belum optimalnya penyediaan bahan ajar sesuai kebutuhan ABK.

Dilihat dari lingkungan sekolah, peneliti menemukan ada beberapa sekolah yang kondisi lingkungan disekitar sekolah belum mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif. Peneliti melihat lokasi kurang resementatif di ketiga sekolah tersebut, ruang koridor, halaman, lapangan sekolah terlalu sempit.

Dari segi kebijakan teknis di sekolah inklusif belum secara maksimal dilaksanakan terkendala dengan, kompetensi guru, sarana prasarana, dan pembiayaan. Kebijakan dibuat untuk menjadi pedoman dalam bertindak, mengarahkan kegiatan dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Syafaruddin, 2008), hlm.77-78).

Mengimplementasikan pendidikan inklusif perlu menyusun berbagai program kegiatan antara lain: a) modifikasi kurikulum, pengembangan strategi pembelajaran dan jenis tata cara penilaian; 2) pembinaan kepada para guru, staf tata usaha hanya pada tugas operator dan kepada para peserta didik; 2) pengembangan sarana dan prasarana untuk anak berkebutuhan khusus.

Fokus masalah yang diteliti adalah efektivitas kebijakan pendidikan inklusif pada tingkat sekolah dasar. Fokus penelitian ini dirinci menjadi beberapa pertanyaan penelitian, berikut: 1) bagaimanakah proses penetapan kebijakan pendidikan inklusif; 2) bagaimanakah sosialisasi kebijakan pendidikan inklusif di sekolah dasar; 3) bagaimanakah program pendidikan inklusif; 4) bagaimana implementasi pelaksanaan pendidikan inklusif; 5) bagaimanakah upaya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan inklusif; 6)

bagaimana dampak implementasi pendidikan inklusif.

Berbagai upaya mewujudkan efektifitas kebijakan pendidikan inklusif di sekolah yang memprioritaskan input, proses, output dalam meningkatkan pendidikan inklusif di SDN Kota Cimahi, terus dilakukan dengan melibatkan seluruh stakeholders dan pelaksana pendidikan.

2. METODE PENELITIAN

1. Penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan studi kasus ada tiga sekolah, yaitu: SDN 2 Cibabat Mandiri, SDN 5 Leuwi Gajah dan SDN Cigugur Tengah Kota Cimahi.
2. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan, wawancara dan studi dokumentasi.
3. Sumber data: kepala sekolah, guru, komite, orang tua siswa, pengawas
4. Pengolahan data dilakukan melalui proses: reduksi, display, dan verifikasi data.



Gambar 1. 4 Desain Penelitian (Diadopsi dari Nasution, 1996, hlm. 27)

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

- a. Proses penetapan kebijakan ketiga sekolah tersebut telah menetapkan kebijakan yang bersifat teknis yang ditetapkan pada rapat kerja sekolah. Penetapan kebijakan guru pembimbing khusus, tim POKJA
- b. sosialisasi kebijakan pendidikan inklusif dilakukan oleh kepala sekolah di-

- tujuan tenaga pendidik, peserta didik, dan orang tua, serta masyarakat pada umumnya. Melalui kegiatan pertemuan rutin pada awal tahun pelajaran.
- c. Program pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif untuk mengimplementasikan pendidikan inklusif ketiga sekolah tersebut menyusun berbagai program kegiatan antara lain: a) modifikasi kurikulum, pengembangan strategi pembelajaran dan jenis tata cara penilaian; 2) pembinaan kepada para guru, staf tata usaha hanya pada tugas operator dan kepada para peserta didik; 2) pengembangan sarana dan prasarana untuk anak berkebutuhan khusus
 - d. Implementasi program pendidikan inklusif dilaksanakan tim POKJA yang dibentuk oleh kepala sekolah didalamnya dari unsur guru reguler, guru pembimbing khusus, psikolog, tim dokter. Dalam pelaksanaan program belum adanya keterlibatan secara formal dari dinas sosial dan kesehatan padahal kedua instansi tersebut sangat diperlukan dalam implementasi pendidikan inklusif. Implementasi layanan pembelajaran dilaksanakan melalui pembelajaran inklusif di diklasifikasikan menjadi lima model layanan pembelajaran, yaitu: kelas reguler (inklusi penuh), kelas pendampingan, kelas remedial, kelas praklasikal dan kelas khusus. Implementasi layanan pembelajaran masih dihadapkan pada persoalan diantaranya: a) kemampuan guru dalam menangani anak berkebutuhan khusus yang sangat bervariasi tingkat kebutuhan; b) sarana dan prasarana belum mendukung untuk melayani anak berkebutuhan khusus; dan c) keterbatasan pendanaan yang
- butuhkan untuk mendatangkan tenaga ahli dan psikolog.
- e. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh pengawas SLB tingkat propinsi satu tahun sekali dan pengawas TK/SD yang ada pada tingkat pada kab/kota dilakukan satu bulan sekali. Pengawasan menyangkut teknik edukatif. Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas TK/SD belum berjalan efektif karena pengawasan bukan berlatar belakang SLB
 - f. Dampak dari efektifitas implementasi kebijakan pendidikan inklusif dapat memperluas akses masyarakat yang memiliki anak berkebutuhan khusus untuk mengikuti pendidikan jenjang pendidikan dasar.
- ### 3.2 Pembahasan
- a. Proses penetapan kebijakan operasional pendidikan inklusif
- Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa proses penetapan kebijakan operasional pendidikan inklusif merupakan kegiatan awal yang dilakukan kepala SDN 2 Cibabat Mandiri, SDN 5 Leuwi Gajah, dan SDN Cigugur Tengah dalam upaya mewujudkan pendidikan inklusif yang bermutu, yaitu yang sesuai dengan kebutuhan serta harapan peserta didik untuk melanjutkan studi ke SMP Negeri/Swasta baik reguler, hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Budiyanto, dkk. (2009, hlm.10) menyatakan bahwa terdapat lima prinsip penyelenggaraan pendidikan inklusif yaitu sebagai berikut: 1) prinsip pemerataan dan peningkatan mutu. 2) prinsip kebutuhan individual 3) prinsip kebermaknaan 4) prinsip keberlanjutan 5) prinsip keterlibatan
- Sementara itu, Sapon-Shevin dan O'Neil (Tarmansyah, 2007, hlm.83)

menyatakan bahwa pendidikan inklusif sebagai sistem layanan pendidikan yang mempersyaratkan agar semua anak berkelainan dilayani di sekolah-sekolah terdekat, di kelas reguler bersama-sama teman seusianya. Oleh karena itu, ditekankan adanya perombakan sekolah, sehingga menjadi komunitas yang mendukung pemenuhan kebutuhan khusus setiap anak, sehingga sumber belajar menjadi memadai dan mendapat dukungan dari semua pihak, yaitu para siswa, guru, orang tua, dan masyarakat sekitarnya.

Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem manajemen sekolah inklusif ternyata mempengaruhi persepsi manajemen kualitas actual maupun ideal. Selanjutnya Oakland (dalam Dorothea, 2003, hlm.104) bahwa “ hal yang harus diketahui oleh pimpinan dalam melaksanakan manajemen kualitas salah satu diantaranya adalah tanggung jawab dalam menyusun filosofi, kebijakan kualitas, dan menyediakan motivasi melalui kepemimpinan”

b. Sosialisasi pendidikan inklusif yang dapat diaplikasikan

Sosialisasi pendidikan inklusif di ketiga SDN 2 Cibabat Mandiri, SDN 5 Leuwi Gajah dan SDN Cigugur Tengahdi Kota Cimahifokus pada program kurikulum yang dilaksanakan mengikuti kurikulum biasa di sekolah, kegiatan perencanaan kurikulum yang digunakan dalam pendidikan inklusif pada dasarnya menggunakan kurikulum standar nasional yang berlaku di sekolah umum. Dalam hal ini, kurikulum yang digunakan di SDN 2 Cibabat Mandiri, SDN 5 Leuwi Gajah ada tiga kurikulum inklusif. *Pertama*, sudah sesuai dengan ketentuan dari

pemerintah yaitu menggunakan kurikulum reguler (KTSP), kedua, kurikulum reguler dengan modifikasi, dan *kedua*, kurikulum PPI. Sedangkan SDN Cigugur Tengah hanya dua kurikulum, diantaranya: pertama, kurikulum reguler, dan kedua, kurikulum PPI.

Menurut Tarmansyah (2007, hlm.154) untuk modifikasi kurikulum merupakan model kurikulum dalam sekolah inklusi. Modifikasi pertama adalah mengenai pemahaman bahwa teori model itu selalu merupakan representasi yang disederhanakan dari realitas yang kompleks. Lebih lanjut, menurut Direktorat PLB (Tarmansyah, 2007, hlm.168) modifikasi dapat dilakukan dengan cara modifikasi alokasi waktu, modifikasi isi/materi, modifikasi proses belajar mengajar, modifikasi sarana dan prasarana, modifikasi lingkungan untuk belajar, dan modifikasi pengelolaan kelas. Dengan kurikulum akan memberikan peluang terhadap tiap-tiap anak untuk mengaktualisasikan potensinya sesuai dengan bakat, kemampuannya dan perbedaan yang ada pada setiap anak.

c. Program dan implementasi pendidikan inklusif

1) Program Kurikulum

Dalam penyusunan program kerja SDN 2 Cibabat mandiri sudah relevan dengan visi, misi, serta tujuan sekolah. Program sekolah ini merupakan program operasional, yang merupakan kumpulan rencana kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu untuk dilaksanakan di sekolah dalam rangka mencapai tujuan. Hal ini sama dengan SDN 5 Leuwi Gajah sudah ada program

tahunan, yakni rencana kegiatan sekolah yang akan dilaksanakan selama satu tahun pelajaran. Program Tahunan ini dapat dijadikan sebagai petunjuk dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan sekolah selama satu tahun pelajaran agar semua kegiatan di sekolah berlangsung secara efektif dan efisien, sedangkan SDN Cigugur Tengah sudah adanamun dalam pelaksanaan program-program kegiatan untuk menuju visi, misi dan tujuan sekolah itu masih terkendala oleh sarana dan prasarana yang masih kurang.

Inklusif dapat berarti penerimaan anak-anak yang memiliki hambatan ke dalam kurikulum, lingkungan, interaksi sosial, dan konsep dari (visi misi) sekolah.

Stainback (Tarmansyah, 2007, hlm. 82) mengemukakan bahwa: pendidikan inklusif adalah sekolah yang menampung semua siswa di kelas yang sama. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan setiap siswa, maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru agar anak-anak berhasil. Lebih dari itu, sekolah inklusi juga merupakan tempat setiap anak dapat diterima, menjadi bagian dari kelas tersebut, dan saling membantu dengan guru dan teman sebayanya, maupun anggota masyarakat lain agar kebutuhan individualnya dapat terpenuhi.

2) Pendidik

Terkait dengan standar pendidik, SDN 2 Cibabat Mandiri, SDN 5 Leuwi Gajah dan SDN Cigugur Tengah menetapkan standar sesuai permendiknas No 16

tahun 2007 tentang tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Standar tenaga pendidik kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: a) kompetensi pedagogik; b) kompetensi kepribadian; c) kompetensi profesional; dan d) kompetensi sosial. Tenaga pendidik dari ketiga SDN 2 Cibabat Mandiri semua guru reguler dan inklusif sudah mempunyai program kurikulum (program tahunan, program semester, silabus, RPP), program pengayaan, program remedial, program perpustakaan, dll. seperti, sedangkan muatan kurikulum modifikasi pendidik SDN 2 Cibabat Mandiri : a) alokasi waktu, b) isi/materi kurikulum, c) proses belajar mengajar, d) sarana prasarana, e) lingkungan belajar, dan f) pengelolaan kelas. Sejalan Rudiati (2011, hlm.17) mengungkapkan bahwa kompetensi guru dalam sekolah inklusif belum memadai. Kompetensi guru yang belum memadai pada sekolah inklusif mencakup kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Dan Smith. J. David (2006, hlm. 399) menyatakan bahwa banyak teknik dan konsep yang telah diterapkan oleh para pendidik, termasuk metodologi-metodologi yang akan mempermudah proses pembelajaran oleh siswa berkesulitan belajar di sekolah umum.

3) Sarna Prasarana

Dalam proses pembelajaran megoptimalisasikan fasilitas sarana prasarana pendidikan dengan nara sumber yang ada SDN 2 Cibabat Mandiri, yaitu: 1) adanya perencanaan analisis kebutuhan yang dilakukan oleh

guru reguler dan GPK, 2) pelaksanaan analisis kebutuhan sarana prasarana melibatkan kepala sekolah dan guru, 3) pengelolaan sarana prasarana pembelajaran diserahkan kepada guru yang ditunjuk kepala sekolah, 4) keterlibatan guru dalam analisis kebutuhan sarana prasarana pembelajaran yang tahu kondisi kelasnya

Hal yang sama di SDN 5 Leuwi Gajah mengoptimalkan fasilitas sarana prasarana pendidikan dengan nara sumber, yaitu 1) selalu ada analisis kebutuhan sarana prasarana pembelajaran setiap awal tahun, 2) ada analisis kebutuhan sarana prasarana pembelajaran oleh guru yang ditunjuk oleh kepala sekolah, 3) memakai dan memanfaatkan sarana alat peraga setiap KBM, 4) keterlibatan guru dalam pelaksanaan sarana prasarana pembelajaran

Tidak jauh berbeda dengan SDN Cigugur Tengah pengembangan sarana dan prasarana belajar yang merupakan suatu bagian yang integral dalam kerangka strategi dasar peningkatan mutu secara berkesinambungan, selain peningkatan profesionalitas guru dan manajemen sekolah. Analisis kebutuhan sarana prasarana pembelajaran terletak pada: 1) rencana analisis kebutuhan sarana pembelajaran sebelum tahun pelajaran baru, 2) dalam pengadaannya kepala sekolah melibatkan guru disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, 3) kepala sekolah menunjuk guru dalam pengelolaan sarana pembelajaran

Menurut Daryanto, (2006, hlm.103-104) bahwa sarana pendidikan diklasifikasikan menjadi tiga macam,

yaitu (1) habis tidaknya dipakai; (2) bergerak tidaknya pada saat digunakan; (3) hubungannya dengan proses belajar mengajar.

SDN 2 Cibabat Mandiri, SDN 5 Leuwi Gajah dan SDN Cigugur Tengah guru sudah melaksanakan bentuk modifikasi proses belajar-mengajar pada siswa lamban belajar, yaitu: 1) menggunakan bahasa sederhana namun jelas dengan cara perlahan; 2) melakukan pengulangan materi jika menyampaikan materi pelajaran; 3) pembelajaran dilakukan secara kooperatif karena anak lamban belajar atau slow learner tidak menyenangi kompetitif; 4) memberikan pemahaman konsep, tidak cukup dengan menghafal konsep; dan 5) Menempatkan siswa dalam konteks. Hal tersebut kurang sesuai dengan pendapat dari (Nunung, 2012, hlm.84) bahwa untuk anak berkebutuhan khusus yang memiliki intelegensi di bawah normal (anak lamban belajar) dapat dimodifikasi menjadi 10 jam, atau lebih. Ini berlaku misalnya dalam materi pelajaran tertentu yang diperkirakan alokasinya selama enam jam, dapat dimodifikasi menjadi 10 jam.

4) Penilaian dan Lulusan

SDN 2 Cibabat Mandiri dalam mutu lulusan cukup tinggi, dengan kelulusan 100% setiap tahun dari seluruh mata pelajaran, tingkat kelulusan tersebut terletak pada proses pembelajaran khususnya (matematika, IPA) kurikulum SNP menyelaraskan ABK dan selalu bekerjasama dengan sekolah-sekolah inklusif terdekat, begitu juga pada output dengan pembimbingan belajar dan try out dan masuk SMPN

reguler/inklusif hasilnya sangat memuaskan 80%, SMPS reguler/inklusif 30%. Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dengan SMPN/S favorit di Kota Cimahi dibekali dengan kemampuan skill dan kemandirian khusus ABK, dan yang mengembirakan dalam bidang akademik selalu mengikuti (OSN, OS2N, dll baik tingkat Kec/Kota) maupun non akademik dan masyarakat sudah percaya dengan mutu SDN 2 Cibabat Mandiri.

Berbeda dengan SDN 5 Leuwi Gajah dengan intensitas cukup tinggi dan besarnya minat siswa dalam proses pembelajaran menyebabkan lulusan peserta didik cukup tinggi pula. Capaian kelulusan 100% setiap tahun baik program reguler maupun program inklusif dan lulusan tiap mata pelajaran tingkat kelulusan 100% dan dibekali dengan skill khusus ABK dan kemandirian, hampir 95% masuk ke SMPN/S sehingga pada pendaftaran siswa baru untuk para peserta didik SDN 5 Leuwi Gajah dapat diprioritaskan. Dan yang paling mengembirakan ketika SDN 5 Leuwi Gajah untuk ABK saat tampil dalam saresehan dan klinik anak dengan disabilitas tema aku bisa koo. Menghasilkan lulusan yang cukup mengembirakan dalam bidang akademik maupun non akademik. Sesuai dengan permendiknas 23 tahun 2006 tentang SKL. Pada dasarnya mutu lulusan 100%. Selama tiga tahun terakhir lulus UN 100% dan hampir 95% melanjutkan ke SMPN/S sisanya belum terdata 5% dan masyarakat sudah percaya dengan mutu SDN 5 Leuwi Gajah. Sedangkan SDN Cigugur Tengah kompetensi lulusan tiap mata

pelajaran tingkat kelulusan 100% dan dibekali dengan skill khusus ABK dan kemandirian.

Dalam menyusun laporan penilaian hasil belajar dalam seting pendidikan inklusi. (Kustawan, 2006, hlm. 41):

- a. Hasil akhir untuk siswa berhubungan dengan apa yang dapat siswa lakukan sebelumnya dan apa yang dapat dilakukannya sekarang (Mengacu pada perkembangan siswa).
- b. Keputusan tingkat pencapaian hasil belajar berdasarkan berbagai informasi.
- c. Keputusan tentang kemampuan siswa mempertimbangkan hasil kerja atau karya siswa yang dikumpulkan.
- d. Menggunakan sistem pencatatan yang bervariasi.

5) Pembiayaan

Ketiga SDN 2 Cibabat Mandiri, SDN 5 Leuwi Gajah dan SDN Cigugur Tengah menetapkan standar SNP tentang sistem manajemen sekolah sebagai acuan standar pengelolaan sekolah difokuskan pada tiga hal, yaitu (1) perencanaan program pendidikan di sekolah; (2) pelaksanaan program pendidikan di sekolah, dan (3) pengawasan program pendidikan di sekolah. Pengelolaan manajemen sekolah terletak pada proses dengan terus-menerus dalam peningkatan mutu, kualitas/mutu harus ditentukan oleh pengguna jasa sekolah, prestasi pada visi tidak pada pemaksaan aturan, sekolah menghasilkan siswa yang memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap, berkarakter. Pada dasarnya, penyusunan anggaran merupakan negoisasi antara pemimpin

dengan pimpinan dibawahnyadalam menentukan besarnya alokasi biaya dalam penganggaran. Hasil dari suatu negoisasi merupakan suatu pernyataan tentang pengeluarandan pendapatan yang diharapkan dari setiap sumber dana (Nanang Fattah, 2004: 47).

5) Hubungan Sekolah dan Masyarakat

Ketiga sekolah keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan terbagi kedalam dua kelompok keterlibatan, *pertama* keterlibatan dalam proses pembelajaran, *kedua* dalam proses manajemen sekolah. Keterlibatan dalam kegiatan belajar mengajar yang melibatkan komponen pimpinan sekolah (komponen manajemen sekolah), guru peserta didik, dan masyarakat serta alumni, tidak menyentuh pada subtansi sasaran mutu: 1) masyarakat (orangtua) belum secara optimal dalam pelayanan dan kebutuhan pada proses, dan output (SDN 2 Cibabat Mandiri); 2) berbeda dengan di SDN 5 Leuwi Gajah seelau memberikan pelayanan dan kebutuhan masyarakat/orangtua baik pada proses, maupun output; 3) hal yang sama di SDN Cigugur Tengah keterlibatan masyarakat/orangtua sangat dekat untuk memberikan pelayanan dan kebutuhan proses dan outputnya.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Khadiyanto (2007, Hlm. 31) merumuskan bahwa: "...partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan/pelibatan masyarakat dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan serta mampu untuk meningkatkan

kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi, baik secara langsung maupun tidak langsung sejak dari gagasan, perumusan kebijaksanaan hingga pelaksanaan program".

Masyarakat dapat diartikan sebagai sekumpulan dari sejumlah orang dalam suatu tempat tertentu yang menunjukkan adanya pemilikan norma-norma hidup bersama walaupun di dalamnya terdapat berbagai lapisan antara lain lingkungan sosial (Suparlan, 1990, hlm. 85). Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan. Adapun kewajibannya adalah memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Lebih lanjut partisipasi masyarakat dalam pendidikan bisa meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

6) Layanan Khusus

Dari tiga sekolah dalam kebutuhan pelayanan kepada peserta didik untuk menunjang kegiatan belajar mengajar agar tujuan pendidikan bisa tercapai secara efektif dan efesien. Hal ini, dijelaskan oleh Rohiat (2009,hlm. 28) bahwa: "...manajemen layanan khusus dilakukan dengan tujuan mendukung keberhasilan proses belajar mengajar. Keberhasilan belajar tersebut di antaranya harus ditunjang dengan pusat sumber belajar, pusat kesehatan sekolah, bimbingan konseling, dan kantin sekolah. Manajemen layanan

husus merupakan usaha yang secara tidak langsung berhubungan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan atau ditangani oleh kepala sekolah kepada para siswa agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar mengajar”

Dalam layanan khusus ini, sekolah dapat dikatakan sempurna karena sekolah ini telah mempunyai fasilitas-fasilitas yang menunjang aktifitas siswa, guru dan karyawan. Tetapi sekolah ini selalu berupaya untuk melengkapi dan menyempurnakan sarana dan prasarannya. Lezotte (1983) menemukan dalam penelitiannya bahwa sekolah-sekolah yang unggul itu memiliki karakteristik-karakteristik, yaitu: (1) lingkungan sekolah yang aman dan tertib; (2) iklim serta harapan yang tinggi; (3) kepemimpinan instruksional yang logis; (4) misi yang jelas dan terfokuskan; (5) kesempatan untuk belajar dan mengerjakan tugas bagi siswa; dan (6) pemantauan yang sering dilakukan terhadap kemajuan siswa, dan hubungan rumah-sekolah yang bersifat mendukung. Dalam penelitian ini, tidak disebut-sebut perihal keefektivan guru secara khusus, demikianpun perihal ganjaran insentif, yang pada penelitian lain cukup memberikan sumbangan terhadap prestasi siswa di sekolah.

d. Monitoring

Ketiga sekolah sistem manajemen sekolah terkendala pada SDM, namun anggaran untuk peningkatan mutu tetap harus dilaksanakan kalau tidak dilaksanakan akan memiliki dampak komprehensif terhadap faktor-faktor peningkatan mutu pada komponen

lainnya untuk meningkatkan mutu kinerja sekolah . *Pertama*, posedur pengadministrasian dalam pelaksanaan sistem manajemen sekolah SNP berbasis komputer menjadi beban bagi sebagian pendidik dan tenaga kependidikan (SDN 2 Cibabat Mandiri); *kedua*, SDN 5 Leuwigajah pengembangan sistem manajemen sekolah SNP berbasis komputer dan kualitas dokumen; *ketiga*, sistem manajemen sekolah SNP dan dokumen (SDN Cigugur Tenga). Manajmen mutu sekolah belum sepenuhnya sebagai proses perbaikan terus menerus yang harus diterima secara terbuka, proses EDS menjadi suatu beban dan menjenuhkan karena setiap semester dilakukan EDS internal dan sistem informasi manajemen (SIM).

e. Dampak

Kebijakan pendidikan inklusif dalam pemenuhan hak siswa mendapatkan pendidikan dampaknya terhadap mutu kinerja sekolah baik mutu akademik, mutu manajerial maupun secara keseluruhannya, mutu kinerja akademik di kedua SDN 2 Cibabat Mandiri dan SDN 5 Leuwi Gajah tercapai 100% lulus sebagai sasaran mutu lembaga, guru harus sudah berkualifikasi S1, sarana dan prasarana dan kurikulum sudah terpenuhi dan sudah dilakukan survey, selanjutnya UN semakin baik, masih ada anak yang tidak naik namun semakin berkurang, tidak ada angka putus sekolah dilatarbelakangi bukan masalah akademik. Kemudian di SDN Cigugur Tengah upaya untuk menerapkan sistem manajemen mutu cukup berhasil dalam melaksanakan efektifitas kebijakan pendidikan

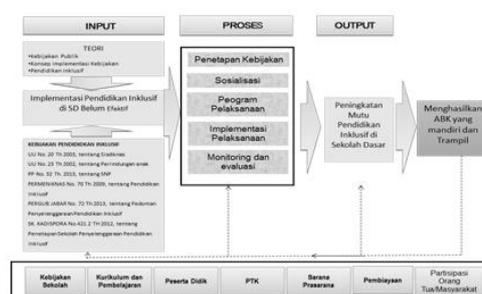
inklusif, cukup dirasakan memiliki dampak terhadap mutu manajerial yang ideal untuk kemungkinan menerapkan kebijakan pendidikan inklusif. Sejalan yang dikemukakan oleh Visscher, (2009,hlm.18) salah satu proses dari implementasi yang dianggap relevan dalam menerapkan sistem manajemen mutu di sekolah yaitu *“The encouragement of user participation and ownership in implementation”*.

Pemenuhan hak siswa mendapatkan pembelajaran ketiga SDN 2 Cibabat Mandiri, SDN 5 Leuwi Gajah dan SDN Cigugur Tengah belum cukup optimal sekolah memberikan layanan pendidikan inklusi, anak berkebutuhan khusus dapat bersekolah di sekolah reguler bersama-sama dengan anak-anak normal, sehingga nantinya akan mempercepat proses penyembuhannya.

Dalam proses pembelajaran sekolah ini menggunakan model atau program pembelajaran individual (PPI). Guru juga memiliki keleluasaan untuk mengubah kurikulum dengan menyesuaikan kemampuan ABK. Ketiga sekolah dalam proses pembelajaran selalu mengedepankan suasana lingkungan belajar yang kondusif bagi siswa reguler dan inklusif, diantaranya: a) guru kelas selalu memberikan pembelajarannya yang menyenangkan; b) ABK secara bersama-sama dengan peserta didik lainnya(anak normal) dalam proses pembelajaran di dalam kelas; c) kegiatan-kegiatan di luar kelas yang juga sangat membantu proses interaksi, komunikasi dan sosialisasi anak berkebutuhan khusus. Sejalan yang dikemukakan oleh Djamarah dan

Aswan Zain (2010,hlm.20) dalam proses belajar mengajar kehadiran media mempunyai arti yang cukup penting. Karena dalam kegiatan tersebut ketidakjelasan bahan yang disampaikan dapat dibantu dengan menghadirkan media sebagai perantara.

f. Model Hipotetik Efektifitas Kebijakan Pendidikan Inklusif



4. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dari keseluruhan uraian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, dan dikaitkan pula dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan penting sebagai berikut :

Pertama, ketiga sekolah tersebut telah menetapkan kebijakan yang bersifat teknis yang ditetapkan pada rapat kerja sekolah. Penetapan kebijakan guru pembimbing khusus, tim POKJA. Kedua, sosialisasi kebijakan pendidikan inklusif dilakukan oleh kepala sekolah ditujukan tenaga pendidik, peserta didik, dan orang tua, serta masyarakat pada umumnya. Melalui kegiatan pertemuan rutin pada awal tahun pelajaran. Ketiga, untuk mengimplementasikan pendidikan inklusif ketiga sekolah tersebut menyusun berbagai program kegiatan antara lain: a) modifikasi kurikulum, pengembangan strategi pembelajaran dan jenis tata cara penilaian; 2) pembinaan kepada para guru, staf tata usaha hanya pada tugas operator dan kepada para peserta didik; 2) pengembangan sarana dan prasarana untuk

anak berkebutuhan khusus. Keempat, implementasi program pendidikan inklusif dilaksanakan tim POKJA yang dibentuk oleh kepala sekolah didalamnya dari unsur guru reguler, guru pembimbing khusus, psikolog, tim dokter. Dalam pelaksanaan program belum adanya keterlibatan secara formal dari dinas sosial dan kesehatan padahal kedua instansi tersebut sangat diperlukan dalam implementasi pendidikan inklusif. Implementasi layanan pembelajaran dilaksanakan melalui pembelajaran inklusif di diklasifikasikan menjadi lima model layanan pembelajaran, yaitu: kelas reguler (inklusi penuh), kelas pendampingan, kelas remedial, kelas praklasikal dan kelas khusus. Implementasi layanan pembelajaran masih dihadapkan pada persoalan diantaranya: a) kemampuan guru dalam menangani anak berkebutuhan khusus yang sangat bervariasi tingkat kebutuhan; b) sarana dan prasarana belum mendukung untuk melayani anak berkebutuhan khusus; dan c) keterbatasan pendanaan yang butuh untuk mendatangkan tenaga ahli dan psikolog. Kelima, monev dilakukan oleh pengawas SLB tingkat propinsi satu tahun sekali dan pengawas TK/SD yang ada pada tingkat pada kab/kota dilakukan satu bulan sekali. Pengawasan menyangkut teknik edukatif. Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas TK/SD belum berjalan efektif karena pengawasan bukan berlatar belakang SLB. Dan Keenam, dampak dari efektifitas implementasi kebijakan pendidikan inklusif dapat memperluas akses masyarakat yang memiliki anak berkebutuhan khusus untuk mengikuti pendidikan jenjang pendidikan dasar.

Sesuai dengan kesimpulan dan implikasinya, paling tidak ada beberapa rekomendasi yang perlu disampaikan sebagai bentuk saran dari hasil penelitian ini.

1) Wali Kota Cimahi

- a. Karena dalam pendidikan inklusif dalam pelaksanaannya perlu adanya

keterlibatan instansi terkait, seperti dinas sosial dan dinas kesehatan. Maka hendaknya wali kota dapat mengeluarkan SK Wali Kota Cimahi tentang keterlibatan penyelenggaraan pendidikan inklusif.

- b. Mengingat selama ini tidak ada pembiayaan khusus pendidikan inklusif, maka perlu dialokasikan dana khusus pada APBD Kota Cimahi

2) Bagi Dinas

- a. Karena di sekolah tidak ada guru yang berlatar belakang anak berkebutuhan khusus, maka dinas perlu menugaskan guru yang berlatar belakang pendidikan khusus
- b. Pihak dinas hendaknya menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk terselenggarakan pendidikan inklusif karena sarana dan prasarana yang ada pada ketiga sekolah tersebut untuk siswa reguler. Sarana yang diperlukan seperti ruang remedial ABK yang terbelakang mental, ruang audiologi, ruang artikulasi bagi ABK tuna rungu, riglet, buku pedoman braile, tongkat putih, dll.

3) Bagi sekolah

- a. Mengingat pendidikan inklusif pada ketiga sekolah ditangani oleh guru reguler, maka pihak sekolah harus selalu proaktif menjalin kerja sama dengan SLB-SLB terdekat dan perguruan tinggi seperti UPI Bandung yang memiliki jurusan Pendidikan Khusus. Kerja sama ini perlu dilakukan untuk membina kemampuan guru dalam pendidikan inklsuif serta dalam pengembangan sarana dan prasarana

4) Bagi penelitian selanjutnya

Mengingat penelitian ini sifatnya studi kasus pada ketiga sekolah, sehingga hasilnya belum menggambarkan keberhasilan pendidikan inklusif. Untuk itu perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai efektifitas

implementasi pendidikan inklusif lebih luas lagi.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Budiyanto, dkk & TIM MCPM-AIBEO. (2009). *Modul Training of Trainers Pendidikan Inklusif*. Departemen Pendidikan Nasional.
- Daryanto. H. M. (2006). *Administrasi Pendidikan, cetakan IV*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Djamarah, Syaiful Bahri dan Aswan Zain. (2010). *Strategi Belajar Mengajar*. Rineka Cipta. Jakarta
- Direktorat Pendidikan Luar Biasa, (2007). *Kegiatan Belajar Mengajar* (Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional)
- Dorothea. Wahyu Ariani,. (2003). *Manajemen Kualitas Pendekatan Sisi Kualitatif*. Ghalia Indonesia; Jakarta.
- Fattah, Nanang. (2013). *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Khadiyanto, Parfi, (2007). *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Unit Sekolah Baru*. Penerbit: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang
- Lezotte, Lawrence, (1985). *Effective School: What School Work and Doesn't Work*. New York:NYT News Letter March.
- O'Neil., (1995), *Can inclusion work* (A Conversation with James Kauffman and Mara Sapon-Shevin), Boston : E Educational Leadership.
- Rudiyati, Sari.(2011).*Potret Sekolah Inklusif di Indonesia*. Makalah disampaikan dalam seminar umum “Memilih Sekolah yang Tepat Bagi Anak Berkutuhan Khusus” pada Pertemuan Nasional Asosiasi Kesehatan Jiwa dan Remaja (AKESWARI) pada tanggal 5 Mei 2011 di Hotel INA Garuda Yogyakarta.
- Ratna Megawangi, (2007). *Pendidikan Karakter Solusi Tepat Membangun Bangsa*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Syafaruddin, (2008). *Efektivitas Kebijakan Pendidikan Konsep, Strategi, dan Aplikasi Kebijakan menuju Organisasi Sekolah Efektif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suparlan, Rahmanto dan Pardiman. (1990). *Kamus Istilah Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Smith J. David (2006). *Inklusi Sekolah Ramah untuk Semua*. Bandung: Penerbit Nuansa
- Tarmansyah. (2007). *Inklusi Pendidikan Untuk Semua*. Jakarta: Depdiknas.
- Tarmansyah. (2009). *Pelaksanaan Pendidikan Inklusif di SD Negeri 03 Alai Padang Utara Kota Padang* (Studi Pelaksanaan Pendidikan di Sekolah Ujicoba Sistem Pendidikan Inklusif). *Pedagogi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*. Vol. IX, No.1.
- Visser, K.L., et al., (2009). *Evidence-based Treatment of Acute Infective Conjunctivitis*. *Canadian Family Physician*. Available from: <http://171.66.125.180/content/55/11/1071.short>. [Accessed 11 March 2011].